

RELEVANSI *FIQH SIYASAH DAULIYAH* DAN AGAMA SEBAGAI *SOFT POWER* DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL: UPAYA INDONESIA MEMBANGUN CITRA ISLAM MODERAT MELALUI DIALOG ANTAR AGAMA DAN DIALOG ANTAR PERADABAN

Rizki Damayanti¹
Universitas Paramadina, Jakarta
rizki.damayanti@paramadina.ac.id

Abstract

In the past, international relations theories that analyzed relations between countries were fairly ignorant of religious factors. These theories, which have developed mostly in Western countries, do separate the state and religion, focusing on the factor of national interest as the reason why one state relates to another. The term that is often used is secularization or reducing the influence of religious organizations in the political system. But today, it is important to talk about the relationship between international politics and religion. This is because the prediction that modernization will cause society to become more secular is not fully realized. As a result, the state cannot ignore the presence of religion in the practice of international relations. Religion, in most democratic systems in Asia, is a factor that is still very closely related to everyday politics. Religion not only serves as a means to demonstrate spirituality, but also influences the developing social and economic structures. Religion can also be a reason for the masses to move to fight for their aspirations. In Indonesia, the influence and role of Islam in foreign policy was strengthened during the era of President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) who emphasized that the international identity of the Indonesian state would reflect its position as a country with the largest Muslim population in the world, the third largest democracy in the world, as well as representing the voice of moderate Islam. This article will discuss Indonesia's efforts to use moderate Islam as its new identity in global politics, especially after the events of 9/11. Specifically, this article finds the relevant of the use of interfaith dialogues and the inter-civilizational dialogue instruments carried out by Indonesia with the principles concept of international relations based on *fiqh siyasah dauliyah*.

Key words: religion, international relations, soft power, moderate Islam, *fiqh siyasah dauliyah*

Pendahuluan

Agama dan politik telah hidup berdampingan sejak zaman kuno. Bahkan seringkali, agama digunakan dalam hubungannya dengan politik atau untuk tujuan politik. Para ahli bahkan berasumsi bahwa meskipun kekuatan modernisasi khususnya sekularisasi menguat, sehingga kedudukan agama yang dulu mendominasi dalam kehidupan publik kemudian mengalami penurunan, tetapi tetap sangat sulit untuk memahami dunia modern tanpa memahami tradisi dan pengaruh agama besar yang melintasi batas-batas global dan kemudian ikut membentuk tatanan politik global.²

Di era globalisasi, agama kemudian menjadi salah satu isu penting dalam politik global. Peter Berger, seorang sosiolog agama terkemuka, menyatakan:

¹ Rizki Damayanti adalah dosen tetap pada Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Paramadina Jakarta dan Kandidat Doktor Pengkajian Islam (Konsentrasi: Islam dan Hubungan Internasional) pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

² Malory Nye, *Religion: The Basics*, 2nd ed., (London: Routledge, 2003), h. 177.

"Far from being in decline in the modern world, religion is actually experiencing resurgence. Therefore, the assumption we live in a secularized world is false...the today's world is a furiously religious as it ever was".³

Klaim Peter Berger ini menyatakan bahwa jauh dari kata kemunduran di dalam dunia modern, agama justru mengalami kebangkitan. Oleh karena itu, adanya anggapan bahwa kita hidup di dunia yang sekuler adalah salah, dunia saat ini justru sangat religius seperti dulu. Dengan kata lain, Berger menyatakan bahwa proses modernisasi tidaklah melemahkan peran agama, tetapi justru memperkuatnya di seluruh dunia, bahkan agama menjadi lebih signifikan dari masa sebelumnya.

Para ahli juga berpendapat bahwa globalisasi telah mempengaruhi kebangkitan agama global. Dari sini kemudian muncul istilah lain seperti "kebangkitan agama" (*"revival of religion"*). Terkait mengenai globalisasi dan kebangkitan agama global, Scott M. Thomas menyatakan bahwa:

"The growing saliency and persuasiveness of religion, i.e. the increasing importance of religious beliefs, practices, and discourses in personal and public life, and the growing role of religious or religiously-related individuals, non-state groups, political parties, and communities, and organizations in domestic politics, and this is occurring in ways that have significant implications for international politics".⁴

Dari definisi ini, dapat dimaknai bahwa semakin menonjol dan persuasifnya keberadaan agama, ditandai dengan semakin pentingnya keyakinan agama, praktik-praktik, dan wacana keagamaan dalam kehidupan pribadi dan publik, serta meningkatnya peran individu yang terkait dengan agama atau keagamaan, kelompok non-negara, partai politik, dan komunitas, serta organisasi dalam politik domestik, dimana hal ini terjadi dengan cara-cara yang memberikan implikasi signifikan bagi politik internasional.

Secara spesifik, Azyumardi Azra juga menyatakan bahwa agama telah kembali ke kehidupan publik dan politik di banyak negara Asia, dimana hal ini bertentangan dengan gagasan dominan yang sebelumnya muncul dan menyatakan bahwa kemerosotan agama merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan karena adanya proses modernisasi, perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial budaya. Fenomena kebangkitan agama ini, banyak terjadi di negara-negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, India, dan China yang telah membawa agama kembali ke ranah politik dan sosial budaya. Hal ini juga ditandai dengan fakta bahwa Asia adalah satu-satunya benua dimana hampir semua agama besar dunia saat ini berasal dan berkembang – diantaranya Hindu, Buddha, Shintoisme, Konfusianisme, Yudaisme, Kristen, dan Islam.⁵

Menguatnya peran agama ini, terlihat jelas dalam kehidupan publik dan politik di beberapa negara Asia. Hindu misalnya memainkan peran penting di India, Buddha merupakan elemen penting dalam kehidupan pribadi dan publik di Thailand dan Sri Lanka, Yudaisme terkait erat dengan identitas nasional di Israel, sedangkan Kristen khususnya Katolik merupakan satu-satunya agama terbesar di Filipina dan Timor Leste. Pada saat yang sama, keberadaan Kristen Protestan juga membuat terobosan besar di Korea Selatan, Jepang, China, Singapura dan tempat-tempat lain di Asia. Sementara Islam adalah agama dominan di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia; di Timur-Tengah dan Asia Tengah; begitu pula di negara-negara Asia Selatan seperti Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan, sekaligus juga menjadi agama minoritas yang penting di India. Terakhir, meskipun kebanyakan orang Jepang menyatakan bahwa mereka tidak

³ Peter Berger, *The Desecularization of the World: Resurgence Religion and World Politics*, (Washington DC: William B. Eerdmans/Ethics and Public Policy Center, 1999), h. 3.

⁴ Scott M. Thomas, *The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations: The Struggle for the Soul of the Twenty-First Century*, (New York: Palgrave Macmillan, 2005), h. 45.

⁵ Azyumardi Azra, "Many Asian Nations are Experiencing a Revival of Religion in Public and Political Life", dalam *Melbourne Asia Review*, diakses pada 8 Juni 2022 dari <https://melbourneasiareview.edu.au/many-asian-nations-are-experiencing-a-revival-of-religion-in-public-and-political-life/>

mempraktekkan Shintoisme, tetapi faktanya sangat mudah untuk menemukan jejak agama ini di dalam kehidupan mereka.⁶

Di Indonesia, fenomena kembalinya Islam ke dalam politik kekuasaan, dimulai ketika Indonesia memasuki era pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Perubahan terlihat ketika artikulasi identitas Islam muncul dan bahkan disebut sebagai pola baru dalam politik luar negeri Indonesia. Dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh *Indonesian Council on World Affairs* (ICWA) pada tanggal 19 Mei 2005 di Jakarta, yang juga merupakan pidato perdana mengenai direksi politik luar negeri Indonesia, Presiden SBY menyebut identitas keislaman akan menjadi proyeksi yang inheren dalam referensi mengenai bangsa Indonesia.⁷ Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa dalam forum ekonomi dunia Kelompok 20 (*Group 20/G-20*) yang menyatakan bahwa seiring G-20 mengukuhkan diri sebagai forum utama terkait masalah ekonomi dunia, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan untuk memposisikan diri dalam G-20 – yaitu sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan sekaligus mewakili suara Islam moderat.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, tulisan ini secara khusus akan berupaya menyoroti keseriusan Indonesia dalam upaya memasukkan Islam moderat sebagai identitas barunya dalam politik global pasca peristiwa 9/11, khususnya dengan menggunakan instrumen dialog antar agama (*interfaith dialogues*) dan dialog antar peradaban (*the inter-civilizational dialogues*). Dalam konteks ini, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kewajiban untuk memproyeksikan wajah Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang moderat. Penguatan kemoderatan sebagai tema besar politik luar negeri Indonesia dilakukan dengan pemberdayaan kelompok moderat di dalam negeri sebagai langkah awal, dimana dinyatakan bahwa keberhasilan memerangi terorisme juga akan ditentukan oleh pemberdayaan kaum moderat (*empowering moderates*).⁸ Di bagian akhir, tulisan ini akan mencoba menyoroti seberapa relevan penggunaan instrumen dialog antar agama dan dialog antar peradaban yang dijalankan oleh Indonesia dikaitkan dengan konsep prinsip hubungan internasional berdasarkan *fiqh siyasah dauliyah*.

Prinsip Hubungan Internasional Berdasarkan *Fiqh Siyasah Dauliyah*

Islam sebagai sebuah agama yang komprehensif tidak hanya membahas terkait urusan beribadah dan aqidah, tetapi juga memuat tentang varian sektor lain yang salah satunya adalah hubungan suatu negara dengan negara lain (hubungan internasional). Dalam konteks ini, bidang keilmuan Islam yang terkait dengan persoalan *siyasah* (politik) adalah *fiqh siyasah*. Pengertian *siyasah*, baik secara epistemologi maupun terminologis berkaitan erat dengan masalah mengatur, mengurus, memimpin manusia/umat/rakyat dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga dapat mencapai segala manfaat sekaligus terhindar dari segala mudharat. Dengan kata lain, *fiqh siyasah* adalah ilmu mengenai pengaturan negara yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat yang lahir dari hasil pemahaman para ulama mujtahid yang didasarkan pada dalil-dalil yang rinci (ayat Al-Quran dan Hadis) guna membawa umat/rakyat mencapai maslahat sekaligus terhindar dari mudharat.⁹

⁶ Azyumardi Azra, "Many Asian Nations are Experiencing...", diakses pada 8 Juni 2022 dari <https://melbourneasiareview.edu.au/many-asian-nations-are-experiencing-a-revival-of-religion-in-public-and-political-life/>

⁷ Susilo Bambang Yudhoyono, "Independent and Active Foreign Policy in the 21st Century", *Transforming Indonesia: Selected International Speeches*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2005), h. 124-125.

⁸ Hassan N. Wirajuda, "Refleksi 2004 dan Proyeksi 2005", dalam *Himpunan Pidato/Sambutan Menteri Luar Negeri Tahun 2004*, (Jakarta: BPPK Kemenlu, 2005), h. 173.

⁹ Muhammad Qobidl Ainul Arif, *Kebangkitan Perspektif Islam dalam Studi Hubungan Internasional Kontemporer*, dalam *Dauliyah Journal of Islamic and International Studies*, Vol.1 No. 2, (International Relations Unida Gontor, Agustus 2016).

Sementara ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah *siyasah dauliyah*. Dari ragam makna kata *dauliyah*, makna yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional Islam adalah hubungan antar negara. Oleh karena itu, *siyasah dauliyah* adalah ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain (antar negara).¹⁰

Islam sendiri telah memberikan fondasi global ideal tentang hubungan antar negara, baik hubungan bilateral maupun multilateral yaitu *al 'adâlah al 'âlamīyyah* (keadilan universal) dan juga memprioritaskan *al Silm* (damai).¹¹ Lebih lanjut, prinsip-prinsip hubungan internasional berdasarkan *al-siyasah al-kharijiyyah* dari Al-Qur'an dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan kerjasama yang baik dan adil

Hal ini termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan Al-Hujurat ayat 13:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8).

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ

“Hai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13).

Ayat ini menjelaskan pentingnya menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, baik dalam bentuk hubungan antara dua negara (bilateral) maupun hubungan yang terjalin dengan banyak negara (multilateral) dan dalam berbagai kelompok organisasi regional dan internasional yang bertujuan kepada kemaslahatan umat Islam dalam bidang ekonomi, politik, sosial, ketahanan negara, hukum dan lain-lain. Lebih lanjut, Al-Quran menegaskan bahwa tidak ada satu pun negara di muka bumi ini yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya tanpa adanya kontak kerjasama dengan negara lain. Kerjasama antar negara perlu dibangun dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang politik. Inilah yang dikenal dengan hubungan internasional.

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, aktif menjalin hubungan diplomatik misalnya dengan sesama negara Muslim membentuk Organisasi Kerjasama Islam/*Organization of Islamic Cooperation* (OKI/OIC) dan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi/*Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC). Sedangkan organisasi yang dibentuk bersama negara-negara non-Muslim misalnya PBB dan ASEAN.

2. Mengutamakan Perdamaian

Hal ini termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 61:

¹⁰ Mansoor Mir Ahmadi, “Jurisprudence (Fiqh) of International Relations”, dalam *Islamic Politics Research*, Vol. 1 Issue 4, h. 42, (Imam Sadiq Research Institute of Islamic Sciences, 2014).

¹¹ Labeeb Ahmed Bsoul, “Theory of International Relations in Islam”, dalam *Digest of Middle East Studies*, Vol. 16 Issue 2, Maret 2010, h. 71, diakses pada 11 Februari 2022 dari <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1949-3606.2007.tb00127.x>

وَأَنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Anfal [8]: 61).

Berlandaskan pada ayat di atas, hubungan yang terjadi antara kaum Muslim dengan bangsa lain didasarkan pada ajaran Islam yang menuntut kaum Muslim untuk senantiasa memelihara perdamaian antara kaum Muslim dengan internal Muslim dan eksternalnya. Islam telah meletakkan pangkal perdamaian dalam hubungan internasional dengan satu ketetapan pokok bahwa kaum Muslim tidak dibenarkan sekalipun untuk campur-tangan terhadap urusan internal bangsa-bangsa lain.¹² Metode dakwah Rasulullah sendiri tidak terlepas dari ketetapan pokok ini, baik ketika fase Makkiah maupun Madinah.

Dalam konteks ini, Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi upaya perdamaian dunia. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat – dimana salah satu tujuan nasional Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Politik luar negeri Indonesia juga berlandaskan pada asas bebas aktif yang digagas sejak awal kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.¹³ Makna bebas dan aktif dalam politik luar negeri Indonesia didefinisikan bahwa Indonesia berada pada posisi netral, tetapi masih aktif memainkan perannya dalam kancah internasional. Melalui politik luar negeri bebas aktif ini, Indonesia menjadi salah satu negara perintis gerakan non-Blok yang tidak memihak ke dalam blok manapun semasa periode Perang Dingin, sekaligus menjalankan prinsip non-intervensi terhadap politik dalam negeri negara lain.

Indonesia juga terlibat aktif dalam upaya menjaga perdamaian dunia, dimana pada tahun 1956 Indonesia untuk pertama kalinya mengirimkan Kontingen Garuda dalam misi perdamaian PBB ke Gurun Sinai di Timur Tengah. Indonesia secara konsisten juga mendukung kemerdekaan Palestina, penentangan terhadap invasi Afghanistan tahun 2001, penentangan terhadap Perang Irak 2003, serta kecaman atas penggunaan kekuatan Israel terhadap Libanon dan juga di Jalur Gaza.¹⁴ Konsistensi arah politik luar negeri Indonesia ini juga ikut mempengaruhi dan tercermin ketika Indonesia merespon kekejaman yang dilakukan terhadap populasi Muslim Rohingya di Myanmar dan Uighur di China.

3. Memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai

Hal ini termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 62:

وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِبَصَرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ

“Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindung) bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongan-Nya dan dengan (dukungan) orang-orang mukmin.” (Q.S. Al-Anfal [9]: 62).

Melalui ayat ini, Al-Quran mengajak umat Islam untuk selalu siap dan dapat membela diri serta menangkis agresi. Dengan kata lain, membangun kekuatan dan kemampuan harus diperuntukkan untuk tujuan defensif atau pencegahan, tetapi tidak untuk ofensif atau agresi ilegal. Hal ini sejalan dengan tujuan Indonesia dalam mengembangkan kekuatan pertahanan, yang tidak dimaksudkan sebagai perlombaan senjata (*arms race*), tetapi ditujukan sebagai sebuah upaya mewujudkan standar profesionalisme kekuatan pertahanan dengan mengacu pada visi, misi, kebijakan Indonesia (Nawacita) dan kebijakan Poros Maritim Global (*Global Maritime Fulcrum*/GMF). Dengan kata lain, penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia

¹²Muhammad Abu Zahra, *al-Islam wa 'Alaqa al-Dauliyah*, Terj. Muhammad Zein Hassan “Hubungan-Hubungan Internasional dalam Islam”, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 1, 1973), h. 52.

¹³Fadlan Muzakki, “Theory, Practice, and Analysis of Indonesia's Foreign Policy”, dalam *Jurnal Translitera* edisi 5/2017, h. 17-18, diakses pada 9 Desember 2021 dari <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/translitera/article/view/360/350>

¹⁴Rizal Sukma, *Islam in Indonesian...*, h. 117.

dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan, teritorial negara, keutuhan dan keselamatan bangsa.¹⁵

4. Peperangan diizinkan hanyalah dalam keadaan terpaksa dan untuk tujuan defensif, bukan ofensif.

Hal ini termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 39 dan ayat 40:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizhalimi. Dan sesungguhnya Allah Maha kuasa untuk menolong mereka.” (Q.S. Al-Hajj [22]: 39)

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (Q.S. Al-Hajj [22]: 40).

Berlandaskan ayat-ayat di atas, maka dalam tataran implementasi hubungan internasional, baik dengan negara agresor (*al Muhâribîn*) maupun dengan negara non agresor, Islam melarang keras memulai tindak kekerasan kecuali dalam kondisi terdzalimi. Perang dalam konsepsi Islam adalah *amaliyah difâ'iyyah* (aksi pembelaan) bukan *amaliyah hujûmiyyah* (aksi penyerangan). Jadi, dalam konteks ini, Islam membolehkan perlawanan terhadap negara agresor atas nama pembelaan. Selama masih ada alternatif lain selain perang, maka tidak diperbolehkan melakukan peperangan. Ini merupakan bukti bahwa Islam sesuai tuntunan Al-Quran, mendahulukan cara-cara damai dalam hubungan internasional. Realitas perbedaan suku dan bangsa bukanlah menjadi dasar untuk saling memerangi, melainkan untuk saling bekerjasama sehingga pada akhirnya akan tercipta *win-win solution*.¹⁶

5. Melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dan tidak melanggarnya

Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 7:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ ۖ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. At-Taubah [9]: 7).

Terkait ayat di atas, dalam hubungan internasional hal ini termuat dalam asas *pacta sunt servanda*, yaitu salah satu prinsip hukum yang diakui secara universal dan

¹⁵ Defence Ministry of the Republic of Indonesia, *Indonesia Defence White Paper*, 2015, h. 3, diakses pada 6 September 2021 dari <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/05/2015-INDONESIA-DEFENCE-WHITE-PAPER-ENGLISH-VERSION.pdf>

¹⁶ Labeed Ahmed Bsoul, “Theory of International...”, h. 74.

keberadaannya telah diketahui. Dalam relevansinya terkait perjanjian internasional, prinsip ini menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang disepakati antara para pihak menjadi mengikat secara hukum dan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan itikad baik.¹⁷ Pembukaan dan Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian dan Konvensi Wina 1986 menegaskan kembali keberadaan hukum ini sebagai prinsip serta panduan dalam membuat dan melaksanakan perjanjian internasional. Dalam sistem hukum Indonesia, adanya asas tersebut mengilhami terbentuknya Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) Perdata dan Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Pemerintah Indonesia mengakui dan menerima asas *pacta sunt servanda* sebagai asas hukum dalam pembuatan perjanjian internasional dengan negara atau organisasi internasional. Indonesia berjanji akan melaksanakan perjanjian internasional yang telah dibuat dengan itikad baik. Janji Indonesia yang demikian adalah mengikat Indonesia.

6. Menyeru dengan cara yang baik dan menempuh jalan diplomasi

Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالتَّيِّبِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.” (Q.S. An-Nahl [16]: 125).

Nabi Muhammad SAW menggunakan metode negosiasi, baik secara pribadi maupun sebagai jalan dakwah dalam mengajak banyak orang untuk memeluk Islam. Cara yang ditempuh Nabi Muhammad SAW ini sejalan dengan ayat Al-Quran di atas. Pada fase Madinah, Nabi Muhammad SAW bahkan memperkokoh konstruksi sosial politik melalui pembentukan Piagam Madinah, yaitu pada tahun pertama hijriyah sebagai produk ketatanegaraan Madinah. Piagam Madinah memuat aturan tentang interaksi sosial antar sesama Muslim (hubungan internal) dan antara kaum Muslim dengan non-Muslim (hubungan eksternal). Piagam Madinah juga memuat kewajiban bela negara, menghormati perbedaan agama, dan lain sebagainya.¹⁸

Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia senantiasa berupaya menerapkan penggunaan diplomasi *soft power* dalam upaya menghadirkan wajah alternatif Islam kepada negara-negara Barat sekaligus mempertahankan citra internasionalnya sebagai negara Muslim moderat. Terkait hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat, pemerintah Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan sigap menggunakan narasi dalam diplomasi publiknya, yaitu menjelaskan bahwa Islam, demokrasi, dan masyarakat modern dapat hidup berdampingan secara damai.

Agama sebagai *Soft Power* dalam Hubungan Internasional

Agama yang dahulunya diasingkan dalam dinamika studi Hubungan Internasional karena dianggap sebagai variabel yang tidak dapat diukur sehingga memberikan kesulitan bagi para ilmuwan sosial, tetapi saat ini agama justru telah mengambil peranan yang sangat besar. Kemunculan agama dalam kajian Hubungan Internasional disebabkan adanya gerakan keagamaan yang dilakukan oleh kelompok fundamental agama. Peristiwa 9/11 menjadi salah satu contoh aksi radikal berupa terorisme yang dilakukan oleh kelompok fundamental

¹⁷ Aziz T Saliba dari “Universidade de Itauna dan Faculdades de Direito do Oeste de Minas, Brazil menulis komentarnya berjudul *Comparative Law Europe*”, dalam *Contracts and Legislation*, Vol. 8 No. 3, September 2001, dalam <http://pihilawyers.com/blog/?p=16>

¹⁸ Maria Vaiou, *Diplomacy in the Early Islamic World: A Tenth-Century Treaties on Arab-Byzantine Relations*, (London: I.B. Tauris, 2019), h. 59.

agama.¹⁹ Hal ini kemudian dikaitkan dengan kajian proses perumusan politik luar negeri, dimana dalam merumuskan dan mengimplementasikan politik luar negerinya, setiap negara memang harus mempertimbangkan faktor-faktor tertentu terkait keadaan internasional dan domestik (intermestik) yang melingkupi negaranya. Dalam hal ini, menurut Kegley, Wittkopf dan Scott M. Thomas, isu agama merupakan salah satu isu kebijakan intermestik dalam dunia kontemporer.²⁰ Artinya, ketika kebijakan tersebut berkaitan dengan masalah agama, maka sebuah negara harus mempertimbangkan faktor internasional dan domestik, dan bukan hanya mendasarkan pada satu faktor saja. Dengan kata lain, intermestik melambangkan penggabungan politik domestik dan internasional.

Dalam tulisan ini, beberapa faktor internasional yang dipandang relevan mempengaruhi kebijakan Indonesia untuk mengadopsi Islam moderat sebagai identitas barunya dalam politik global – yang salah satunya ditandai dengan upaya penyelenggaraan berbagai dialog antar agama dan dialog antar sebagai bagian dari instrumen diplomasi Indonesia – diantaranya menguatnya isu terorisme sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia, label “terorisme Islam”, dan unilateralisme Amerika Serikat (AS). Sementara yang menjadi faktor domestik, diantaranya adanya kendala infrastruktur hukum dan kurangnya kapasitas kelembagaan untuk melawan terorisme, krisis persepsi “Barat versus Islam”, perlunya menyeimbangkan kebutuhan akan keamanan dengan demokratisasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta kebutuhan untuk mempromosikan citra moderat Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Di samping itu, terdapat dua faktor lainnya dalam faktor internasional, yang ikut mempengaruhi pelaksanaan dialog antar agama dan antar peradaban dalam diplomasi Indonesia. Kedua faktor tersebut adalah globalisasi dan kebangkitan global agama serta maraknya diplomasi multi-jalur (*Multi-Track Diplomacy*).²¹ Kedua faktor tersebut dimasukkan karena tidak semua negara akhir-akhir ini dapat mengabaikan fenomena globalisasi dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Di era globalisasi pula, terjadi kebangkitan global agama yang dianggap sebagai fakta penting yang ikut mempengaruhi kebijakan sebuah negara.

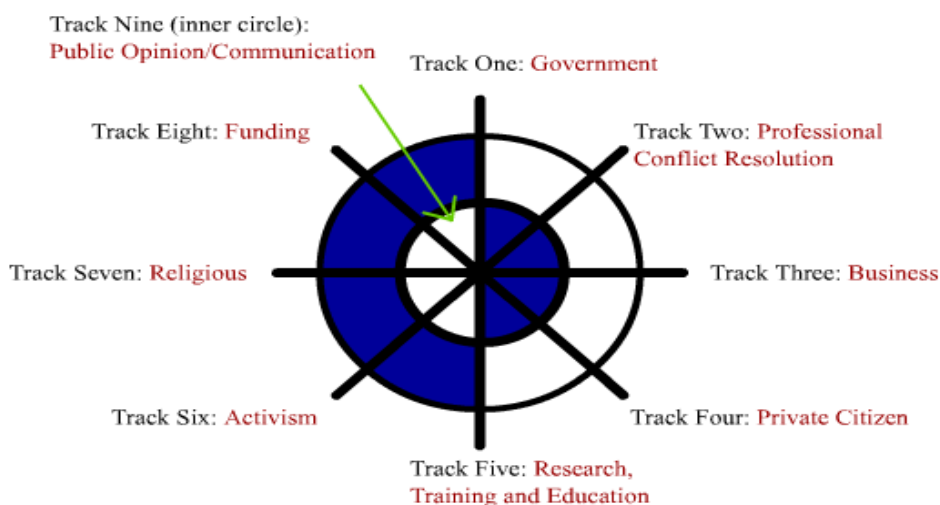
Di dalam sistem *multi-track diplomacy* sendiri, salah satu jalur yang terkait dengan agama adalah jalur ke tujuh, yaitu agama yang menggambarkan perwujudan perdamaian melalui praktik kepercayaan atau keyakinan. Jalur ini menjadikan komunitas agama sebagai bagian yang penting. Hal ini sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:

¹⁹ Deina Abdelkader, dkk., *Islam in International Relations: Politics and Paradigms*, (London & New York: Routledge, 2019), h. 21.

²⁰ Charles W. Kegley Jr. dan Eugene Wittkopf, *World Politics: Trends and Transformation*, 8th ed., (Boston: Bedford/St. Martins, 2001), h. 56-57 dan Scott M. Thomas, *The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations: The Struggle for the Soul of the Twenty-First Century*, (New York: Plgrave Macmillan, 2005), h. 34.

²¹ Diplomasi multi jalur (*Multi-Track Diplomacy*) merupakan sebuah ekspansi dari paradigma *First Track Diplomacy (Government)* dan *Second Track Diplomacy (Non-Government)*, dimana praktek diplomasi dalam hubungan internasional mengalami perluasan terutama dari sisi aktivitas diplomasi yang kemudian menjadi lebih fleksibel, yaitu bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi dapat dilakukan oleh siapa pun, dimana pun, dan dalam bentuk apapun. Lihat Louise Diamond dan John Mc. Donald, *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*, (New York: Kumarian Press, 1996), h. 15.

Gambar 1 Sembilan Jalur dalam *Multi-Track Diplomacy*



Sumber: Louise Diamond dan John Mc. Donald, *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*, (New York: Kumarian Press, 1996), h. 15.

Dari gambar 1 di atas, dapat dijelaskan pula bahwa masing-masing dari kesembilan jalur ini merepresentasikan atau menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Meskipun fungsi dan tugas aktor-aktor diplomasi berbeda-beda, tetapi pada saat yang sama, aktor-aktor tersebut satu sama lain akan terkait dan saling berinteraksi untuk membangun kerjasama yang sinergis. Untuk itu, *multi-track diplomacy* harus dilihat sebagai suatu sistem yang menyeluruh (*a system of a whole*).

Lebih lanjut, bagaimana sebuah negara menetapkan dan menerapkan upaya diplomasinya dalam merespon isu terorisme, dinilai lebih dapat dilakukan dengan menggunakan *soft power* daripada *hard power*. Joseph S. Nye menyatakan bahwa “*soft power more than influence, since influence can also rest on the hard power of (military or diplomatic) threats or (economic) payment*”.²² Dari sini dapat dijelaskan bahwa *soft power* lebih dari sekedar pengaruh, karena sebetulnya pengaruh juga dapat bertumpu pada *hard power* yang dimiliki sebuah negara, seperti ancaman (militer atau diplomatik) maupun ekonomi. Nye juga menyatakan bahwa *soft power* dapat didefinisikan sebagai pengaruh tidak berwujud atau tidak langsung seperti budaya, nilai, dan ideologi. Dengan demikian, *soft power* juga mengacu pada kemampuan untuk mempengaruhi apa yang dilakukan entitas lain melalui pengaruh dan dorongan langsung atau tidak langsung, yang biasanya berwujud budaya atau ideologis. *Soft power* tidak selalu identik dengan kekuatan budaya (*cultural power*), meskipun dalam hal ini ekspor barang budaya yang menjadi daya tarik negara lain, juga dapat digunakan untuk mengkomunikasikan nilai sekaligus mempengaruhi publik asing.²³

Dalam konteks ini, maka agama kemudian dapat menjadi salah satu bentuk *soft power*. Hal ini sebagaimana terjadi pasca peristiwa 9/11 yang kemudian diikuti dengan pernyataan Presiden AS George W. Bush terkait *global war on terror*, yaitu ketika nilai-nilai agama menjadi basis persaingan dan perebutan supremasi. Ide serta gerakan Islam ekstremis dan moderat kemudian bersaing dalam upaya mendapatkan dukungan Muslim secara luas terutama dengan menggunakan *soft power*.²⁴ Terdapat tiga penjelasan terkait hal ini. Pertama,

²² Joseph S. Nye, *The Future of Power*, (New York: Public Affairs, 2011), h. 85.

²³ Joseph S. Nye, *The Future of...*, h. 86.

²⁴ Peter Mandaville dan Shadi Hamid, “Islam as Statecraft: How Governments Use Religion in Foreign Policy”, (Washington D.C: Georgetown University’s Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs, 2018), h. 6.

penggunaan simbol Islam ditujukan sebagai cara alami dari para pembuat kebijakan dalam mengekspresikan diri atau dalam upaya menjustifikasi kebijakan mereka. Kedua, digunakan untuk memobilisasi dukungan rakyat dan menghindari penentangan. Ketiga, untuk menarik publik di negara lain melalui pemikiran para pemimpinnya.²⁵ Dalam hal ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk mendukung dan mempromosikan Islam dan Muslim moderat sebagai bagian dari penggunaan *soft-power* kontra-terorisme.

Keseriusan Indonesia dalam upaya memasukkan Islam moderat sebagai identitas barunya dalam politik global ini tentu bukanlah tanpa menghadapi tantangan. Dikaitkan dengan penggunaan *soft power* agama, khususnya Islam, hal ini seolah menjadi sebuah anti tesis terhadap klaim teori benturan antar peradaban (*the clash of civilizations*) yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington yang menyatakan bahwa hal paling dominan dalam percaturan dunia adalah terkait konflik politik global, dimana hal yang paling prinsipil akan terjadi antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok karena perbedaan peradaban. Benturan antar peradaban ini akan mendominasi politik global, sehingga peradaban-peradaban yang ada akan menjadi garis-garis pertentangan di masa depan, termasuk masa depan hubungan Islam dengan Barat juga akan menghadapi tantangan yang sangat besar.²⁶ Secara spesifik Huntington menyatakan bahwa terdapat tujuh atau delapan peradaban yang masing-masing akan saling bersaing, yaitu peradaban Barat, Amerika Latin, Ortodoks Slavia, Jepang, Islam, Hindu, Konfusius, dan juga Afrika. Di antara peradaban-peradaban non-Barat tersebut, menurut Huntington kolusi peradaban Islam-Konfusius adalah yang akan berbenturan dalam tingkat yang paling tinggi dengan peradaban Barat, dan dalam hal ini Huntington memprediksi bahwa perang dunia berikutnya adalah sebuah perang antar peradaban Barat dan Islam.²⁷

Tesis Huntington ini kemudian diperkuat oleh Bernard Lewis dalam tulisannya berjudul *What Went Wrong? The Clash Between Islam and Modernity in The Middle East*. Lewis mengemukakan pemikirannya tentang benturan (*clash*) dikaitkan dengan Islam dan modernitas yang sebenarnya masih terkait dengan tesis Huntington. Dalam tulisan Lewis berikutnya yang berjudul *The Roots of Muslim Rage* juga dinyatakan hal yang sama tentang bagaimana kaum Muslim memposisikan Barat sebagai musuh. Berikutnya, dalam sub judul artikelnya yang berjudul *Clash of Civilization*, Lewis kembali menekankan klaimnya bahwa nilai-nilai Islam dan Barat memang bertentangan, sehingga mustahil akan terjadi koeksistensi antara Islam dan Barat.²⁸

Berkaitan dengan perspektif hubungan Barat dan Islam ini, Bassam Tibi mengajukan argumen yang dipandang sebagai bentuk kontribusinya bagi upaya mengatasi konflik antar peradaban, yaitu melalui dialog antar peradaban. Menurut Tibi, tidak seperti peradaban-peradaban lainnya, peradaban Barat dan Islam memang memiliki potensi konflik yang lebih besar. Dua isu utama yang ada, yaitu politisasi agama dan dampak negatif globalisasi, memperburuk potensi konflik yang mungkin terjadi di antara kedua peradaban ini. Tibi merujuk politisasi agama – yang dalam hal ini ditandai dengan kemunculan semangat pendirian negara Islam – mendorong terjadinya klaim politik yang mengatas-namakan kebenaran ilahi.

Dalam konteks ini, “politik agama” menyajikan konflik-konflik itu sebagai hal yang tidak dapat dinegosiasikan karena nilai-nilai yang mereka dukung dipahami sebagai kebenaran ilahi. Sementara globalisasi kemudian bukan dilihat sebagai keberadaan dunia dalam konteks sebuah desa buwana (*global village*), tetapi justru lebih dipandang sebagai kumpulan dari banyak peradaban dengan nilai-nilai yang saling bertentangan. Dalam upaya mengatasi konflik inilah, menurut Tibi, peradaban harus mengakhiri “perang ide” (*war of*

²⁵Peter Mandaville dan Shadi Hamid, *Islam as Statecraft: How...*, h. 7.

²⁶ Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order*, (Simon & Schuster, 2011), h. 43.

²⁷ Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and...*, h. 53.

²⁸ Salman Hamdani, “Pasang Surut Hubungan Islam Barat”, dalam *Komunika*, Vol. 8 No. 1, 2014, h. 32.

ideas) dan mengembangkan dialog antar peradaban yang berdasarkan pada rasa saling menghormati dan menjunjung nilai-nilai bersama, termasuk demokrasi dan hak asasi manusia.²⁹ Lebih lanjut, menurut Bassam Tibi, untuk mencegah terjadinya benturan peradaban dalam skala luas dan sekaligus menumbuhkan dialog antar peradaban yang fungsional, maka diperlukan analisis tentang konflik berdasarkan nilai (*value-based conflict*) di antara unsur-unsur tertentu di antara peradaban yang berbeda.³⁰

Terkait tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengusung nilai-nilai Islam moderat sebagai *soft power* kontra-terorisinya, keberhasilan Indonesia dalam menghindari benturan khususnya dengan peradaban Barat, sekaligus memperkuat citra Islam moderat akan sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia dalam menjalankan diplomasinya yang dicirikan oleh tiga hal, yaitu adanya hubungan timbal balik dengan kebijakan internasional terkait demokratisasi; narasi khusus terkait koeksistensi antara Islam, demokrasi, dan masyarakat modern; serta berlandaskan pada pendekatan internasional-domestik atau intermestik.

Islam dan Politik Luar Negeri Indonesia

Dengan komposisi lebih dari 88% dari sekitar 270 juta penduduknya yang memeluk agama Islam, menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar berpenduduk Muslim di dunia. Jumlah ini bahkan masih lebih banyak bila dibandingkan dengan gabungan semua negara Arab yang penduduknya memeluk agama Islam. Islam sendiri telah lama menjadi sumber nilai dan norma sosial dalam masyarakat Indonesia, sehingga memainkan peran penting dalam legitimasi politik. Karena kebijakan luar negeri biasanya mencerminkan nilai-nilai suatu negara, maka asumsi yang terbangun adalah Islam di Indonesia juga akan ikut memainkan peran dalam hubungan eksternal Indonesia. Faktanya, sejarah politik Indonesia sejak pasca kemerdekaan menunjukkan tidaklah demikian kondisi yang terjadi di Indonesia. Perdebatan bahkan telah terjadi dalam hubungan antara agama dan negara sejak proses pembentukan negara hingga tercapainya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, yaitu ketika para pendiri negara terlibat dalam debat yang mendalam terkait penetapan dasar negara Indonesia.³¹

Perdebatan ini merefleksikan adanya perbedaan pandangan ideologis dan politik antara kelompok kebangsaan (*secular nationalist*) yang lebih menginginkan bentuk negara non-teokrasi dan kelompok Islam yang mendukung bentuk negara Islam. Ketika kemerdekaan Indonesia dideklarasikan, maka ditempuh “kompromi” di antara kedua kelompok tersebut, dimana republik yang baru berdiri ini disepakati sebagai sebuah negara yang akan berdasarkan pada ideologi Pancasila (*Five Principles*) yang memastikan akan menempatkan secara setara semua agama yang diakui di Indonesia.³²

Dalam perjalanannya, kompromi yang ditempuh para pendiri bangsa tersebut, ternyata tidak mampu memberikan solusi terkait identitas negara. Sebaliknya, hal ini justru menjadi sumber dilema terkait identitas ganda (*dual identity*) yang harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam proses pembuatan kebijakan. Di satu sisi, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Realitas ini tidak bisa diabaikan begitu saja oleh negara, karena Islam merupakan sumber nilai dan norma yang menjadi panduan perilaku dan kehidupan dalam masyarakat. Islam juga telah menjadi pusat bagi legitimasi sosial dan politik di dalam masyarakat. Tetapi di sisi lain, adanya realitas keberagaman agama juga menjadikan pemerintah tidak dapat menyatakan istilah negara dalam satu agama saja.³³ Oleh karena itu, setiap pemerintahan yang berkuasa di Indonesia

²⁹ Bassam Tibi, *Islam in Global Politics: Conflict and Cross-Civilizational Bridging*, (New York: Routledge, 2012), h. 169.

³⁰ Bassam Tibi, *Islam Between Culture and Politics*, (New York: Palgrave, 2001), h. 203.

³¹ Mohamad Zakaria Al-Anshori, *The Role of Islam in Indonesia's Contemporary Foreign Policy*, (Disertasi, Victoria University of Wellington, 2016), h. 78.

³² Rizal Sukma, *Islam in Indonesian Foreign Policy*, (London: Routledge, 2004), h. 27.

³³ Rizal Sukma, *Islam in Indonesian...*, h. 28.

harus mampu menghindari identitas sekularisme dengan cara memperhatikan aspirasi-aspirasi dari kalangan Muslim, tetapi juga harus dapat menghindari penggambaran identitas sebagai negara Islam.

Kondisi dilema identitas ganda ini juga berdampak pada politik luar negeri Indonesia. Dalam konteks ini, identitas Indonesia sebagai negara non-teokrasi justru tergambarkan secara jelas. Sementara, Islam sebagai agama mayoritas justru tidak pernah diadopsi secara resmi ketika menjelaskan kerangka politik luar negeri Indonesia dan bahkan juga tidak dijadikan sebagai dasar ketika menjalankan hubungan luar negeri dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, peran Islam dalam pembentukan agenda dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, hanya ditempatkan pada posisi sekunder. Hal ini kemudian tercermin selama pemerintahan Soekarno dan Soeharto, dimana Islam tidak memainkan peranan utama – baik politik di dalam negeri maupun terkait politik luar negeri Indonesia.³⁴

Meskipun demikian, dapat dinyatakan bahwa peranan Islam di Indonesia mulai muncul sejak awal 1990-an yaitu ketika rezim Soeharto memperkenalkan kebijakan rekonsiliasi bagi Islam dan kelompok Muslim yang ditandai dengan pemberian sejumlah konsesi kepada komunitas Muslim termasuk pendirian Bank Muamalat yang kemudian menjadi bank syariah pertama di Indonesia, meningkatkan otoritas pengadilan Islam, mencabut larangan cadar yang dikenakan oleh perempuan di sekolah, dan pendirian sebuah surat kabar Islam – Republika pada tahun 1993. Soeharto juga menyuntikkan dana ke sekolah-sekolah Islam dan program TV Islam serta membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang ditujukan untuk mengkooptasi intelektual Muslim dan mempromosikan cita-cita Islam. Pembentukan ICMI pada bulan Desember 1990 justru mempercepat kebangkitan Islam politik di Indonesia. Banyak anggota ICMI yang secara aktif mengkritik rezim otoriter Soeharto dan kebijakan pembangunan ekonominya yang hanya menguntungkan segelintir elit dalam pemerintahan. Keberadaan ICMI sekaligus melambangkan kebangkitan politik Islam yang telah tertindas selama lebih dari dua puluh lima tahun.³⁵

Kebangkitan Islam dalam kehidupan publik dan politik di Indonesia ini, terus mengalami penguatan seiring dengan terjadinya era reformasi di Indonesia yang salah satunya ditandai dengan kemunculan banyak partai politik (parpol) sebagai akibat dilakukannya pembaharuan kebijakan pemerintahan B.J. Habibie yang kembali menerapkan sistem multi partai, dimana kemudian mendorong kemunculan 48 parpol yang secara eksplisit merupakan partai Islam atau partai berbasis konstituen Muslim (*Muslim based-parties*).

Setelah Indonesia memasuki era demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden SBY, barulah Islam menunjukkan peran signifikan dalam politik luar negeri Indonesia. Masuknya Islam dalam politik luar negeri Indonesia ini diawali ketika Presiden SBY secara eksplisit mengemukakan pandangannya tentang identitas internasional Indonesia dalam pidato politik luar negeri pertamanya pada tahun 2005, yang menyatakan bahwa identitas ini harus tercermin dalam politik luar negeri yang independen dan aktif, atau dengan kata lain identitas keislaman menjadi proyeksi yang inheren dalam referensi mengenai bangsa Indonesia.³⁶ Pidato politik luar negeri SBY ini menggambarkan keinginan untuk mengubah identitas internasional baru negara, sejalan dengan perubahan politik dalam negeri pasca-Soeharto. Presiden SBY juga menegaskan bahwa identitas internasional negara Indonesia akan mencerminkan posisinya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, negara

³⁴ Dewi Fortuna Anwar, "Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia", dalam *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Vol. 3, The Indonesian Institute of Sciences, 2010, h. 43, diakses pada 16 Januari 2022 dari <http://jissh.journal.lipi.go.id/index.php/jissh/article/view/45/102>

³⁵ Anak Agung Banyu Perwita, *Islam "Symbolic Politics", Democratisation and Indonesian Foreign Policy*, 1999, Buenos Aires: Centro Argentino de Estudios Internacionales, diakses pada 16 Januari 2022 dari https://www.files.ethz.ch/isn/125059/AP_04.pdf.

³⁶ Susilo Bambang Yudhoyono, "Independent and Active Foreign Policy in the 21st Century", dalam *Transforming Indonesia: Selected International Speeches*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2005), h. 124-125.

demokrasi terbesar ketiga di dunia, sekaligus mewakili suara Islam moderat.³⁷ Dengan kata lain, di bawah pemerintahan SBY, Islam kemudian dianggap sebagai aset diplomasi nasional oleh pemerintah Indonesia.

Dimasukkannya Islam ke dalam politik luar negeri Indonesia ini sebetulnya merupakan cerminan dari nilai-nilai domestik, yaitu sebagai hasil dari tekanan domestik dan respon strategis terhadap lingkungan internasional pasca 9/11 dimana demokrasi Indonesia, reputasi toleransi, dan bentuk Islam moderat dipersepsikan sebagai aset domestik yang dapat dimanfaatkan dalam politik luar negeri Indonesia. Dalam konteks ini, salah satu motivasi penting untuk menggunakan Islam dalam politik luar negeri Indonesia, khususnya diplomasi publik Indonesia, adalah untuk memulihkan citra internasional Indonesia pasca bom Bali sekaligus untuk memulihkan persepsi dunia Muslim di kalangan dunia Barat, khususnya pasca tragedi 9/11.³⁸ Pengakuan Islam sebagai aset penting dalam diplomasi publik Indonesia, secara tidak langsung juga didorong oleh Barat, khususnya AS, yang mengharapkan Indonesia menjadi model bagi negara-negara Muslim lainnya karena Islam di Indonesia dipandang memiliki kesesuaian dengan demokrasi dan modernitas. Dengan dorongan Barat, Indonesia telah memperoleh kepercayaan diri dalam memproyeksikan identitas internasional baru yang menekankan citra Islam moderat dalam politik luar negerinya. Maka jelaslah, bukan semata-mata muncul dari faktor domestik, pentingnya Islam dalam politik luar negeri Indonesia juga didorong oleh faktor internasional.³⁹

Penggunaan simbol Islam dalam politik luar negeri Indonesia juga ditujukan untuk memobilisasi dukungan rakyat dan menghindari penentangan. Artinya, hal ini merupakan mekanisme politik di tingkat domestik dengan didasarkan pada dua tujuan, yaitu menarik dukungan bagi kebijakan sekaligus memperoleh legitimasi bagi kebijakan yang dibuat agar tidak muncul penentangan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Islam Indonesia memang moderat dan organisasi Islam *mainstream* Indonesia juga moderat. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang damai, kontribusi organisasi-organisasi Islam dalam *nation and state building*, serta perannya dalam dinamika sejarah Indonesia makin menegaskan karakter Islam damai Indonesia.⁴⁰ Dengan demikian, identitas Islam moderat kompatibel dengan karakter Islam yang ada di Indonesia. Mobilisasi dukungan rakyat dalam politik luar negeri yang mempromosikan Islam moderat ini kemudian terlihat dari upaya mengikutsertakan organisasi Islam dalam diplomasi internasional Indonesia.

Upaya Indonesia dalam Membangun Citra Islam Moderat Pasca 9/11 melalui Dialog Antar Agama dan Dialog Antar Peradaban

Terdapat dua isu penting yang mendorong Indonesia mengambil kebijakan untuk membangun citra Islam moderat. Pertama, citra buruk Islam terutama ketika jaringan organisasi Islam transnasional seperti Al Qaeda, Jamiyyah Islamiyyah (JI) dan Taliban dilekatkan dengan penggunaan kekerasan seperti bom bunuh diri, teror dan penyanderaan. Kedua, citra buruk Indonesia pun kemudian meningkat sebagai akibat terjadinya peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002. Indonesia juga sebenarnya telah mengalami berbagai aksi terorisme, bahkan jauh sebelum peristiwa 9/11. Berbagai peristiwa pengeboman tersebut diantaranya Bom Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada 13 September 2000, Bom Plaza Atrium pada 1 Agustus 2001, Bom Masjid Istiqlal, dan "bom malam Natal" menunjukkan bahwa

³⁷ Dewi Fortuna Anwar, "The Impact of Domestic and Asian Regional Changes on Indonesian Foreign Policy", dalam *Southeast Asian Affairs 2010*, ISEAS-Yusof Ishak Institute, h. 132 diakses pada 30 Desember 2021 dari <https://www.jstor.org/stable/41418562>

³⁸ Mohamad Zakaria Al-Anshori, *The Role of Islam...*, h. 86.

³⁹ Aisyah Murni Songbatumis, "The Role of Islam in Indonesian Foreign Policy: A Case of Susilo Bambang Yudhoyono", dalam *Polish Political Science Yearbook*, Vol. 50 (2), 2021, h. 89, diakses pada 6 Februari 2022 dari <https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppsy/50/ppsy202119.pdf>

⁴⁰ Jeremy Menchik, "Moderate Muslims and Democratic Breakdown in Indonesia", dalam *Asian Studies Review*, Vol. 43 Issue 3, 2019, h. 417, diakses pada 11 Maret 2022, dari <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10357823.2019.1627286>

memang ada "terorisme yang tumbuh di dalam negeri" yang memiliki kaitan dengan jaringan teroris di luar negeri.

Di samping itu, urgensi keterlibatan Islam moderat sendiri, memang memiliki pengaruh terkait hubungannya dengan Barat. Hal ini merujuk pada konteks bahwa dalam Islam terkandung konsep *salam* (perdamaian), *ishlah* (penyelesaian konflik) dan *ukhuwah basyariah* (persaudaraan manusia) yang merupakan bagian dari esensi pesan-pesan Islam. Sementara dalam konteks Islam moderat terkandung nilai-nilai khusus seperti *tasamuh* (toleransi), *tawasuth* (moderasi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan) yang dapat digunakan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam Indonesia bisa berdampingan dengan Pancasila dan konstitusi.⁴¹ Ini pulalah yang menjadi alasan yang mendasari mengapa Indonesia dipandang harus ikut terlibat aktif dalam menyelesaikan konflik internasional, yaitu adanya harapan besar bahwa Islam Indonesia akan menjadi Islam alternatif yang mengilhami perdamaian dan demokrasi, sekaligus diharapkan dapat menjadi wajah alternatif dari Islam damai yang mampu menjadi mediator antara Barat dan Islam.⁴²

Beranjak dari sini, di bawah pemerintahan SBY, Indonesia kemudian berusaha untuk mendukung dan mempromosikan Muslim moderat sebagai bagian dari penggunaan *soft power* kontra-terorismenya. Beberapa program diplomatik yang berfokus pada Islam moderat sebagai citra Islam Indonesia dalam politik global kemudian diselenggarakan. Program diplomatik tersebut diantaranya adalah dialog antar-agama (*interfaith dialogues*), dialog antar-peradaban (*inter-civilization dialogues*), dan menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Cendekiawan Islam (*the International Conference of Islamic Scholars/ICIS*). Agenda ini diorganisir dan diawasi oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dengan melibatkan tokoh agama, media massa, ulama, *think-tank*, pemuda, organisasi kemasyarakatan Islam seperti NU dan Muhammadiyah, dan komponen lain dalam masyarakat sipil.⁴³ Berbagai program terkait Islam moderat ini bahkan sudah dimulai sejak terjadinya peristiwa Bom Bali I tahun 2002 dan menjadi salah satu program prioritas kebijakan luar negeri era pemerintahan SBY.

Dalam perkembangannya, dialog antar agama kemudian menjadi fitur tetap dari pelaksanaan diplomasi publik Indonesia sejak tahun 2004, dimana hingga saat ini Indonesia telah memiliki 31 mitra dialog antar agama bilateral. Dialog lainnya termasuk yang diselenggarakan di Cebu, Filipina (2006); Waitangi, Selandia Baru (2007); Phnom Penh, Kamboja (2008), dan Perth, Australia (2009). Dalam *Regional Interfaith Dialogue* ke-6 di Semarang tahun 2012, juga dinyatakan untuk meluncurkan Rencana Aksi (*Action Plan*) yang ditujukan untuk mempromosikan kesadaran yang lebih besar dan pemahaman bersama tentang agama-agama di antara negara-negara yang terlibat. Dalam *Regional Interfaith Dialogue* tersebut, masing-masing negara peserta juga berbagi pengalaman mereka dalam mempromosikan dialog antar agama sekaligus mendiskusikan program-program konkrit dan kegiatan-kegiatan kerjasama yang dapat direalisasikan di bawah *Action Plan*, yang diantaranya mencakup kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang agama dan tradisi kepercayaan di antara negara-negara yang terlibat. Kegiatan-kegiatan tersebut ditandai dengan adanya keterlibatan aktif dari organisasi masyarakat sipil, pemuda, sekolah, media dan pemerintah. *Regional Interfaith Dialogue* sendiri melibatkan partisipasi tokoh agama, masyarakat sipil, akademisi dan media yang dihadiri 120 delegasi dari negara *co-sponsor*, yaitu Indonesia dan Australia, Selandia Baru, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.⁴⁴

⁴¹ Dewi Fortuna Anwar, "The Impact of Domestic and...", h. 135.

⁴² Dewi Fortuna Anwar, "The Impact of Domestic and...", h. 136.

⁴³ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Laporan Kinerja 2020 Direktorat Diplomasi Publik, Januari 2021.

⁴⁴ Ray Marcelo, Australia Welcomes Interfaith Dialogue Action Plan, diakses pada 11 Maret 2022 dari https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/mr12_011.html

Selain menyelenggarakan berbagai dialog antar agama, Indonesia juga aktif menggelar *Bali Democracy Forum (BDF)* yang merupakan forum atau pertemuan kerjasama negara-negara yang dilaksanakan setiap tahun pada setiap bulan Desember di Bali. BDF diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2008 sebagai forum kerjasama dalam mengembangkan demokrasi serta platform untuk mempromosikan demokrasi dan perdamaian sebagai solusi dan pencegahan konflik antar negara. Secara khusus, forum kerjasama BDF bertujuan untuk meningkatkan kapasitas demokrasi negara-negara peserta dan juga institusi-institusi demokrasi melalui diskusi yang dilakukan antar negara-negara peserta. Selain itu, BDF bertujuan untuk mempromosikan pembangunan politik yang dilakukan dengan berdialog dan bertukar pengalaman antar negara serta menciptakan platform untuk kerjasama dan saling membantu khususnya dalam bidang demokrasi dan pembangunan politik.⁴⁵ BDF diikuti oleh perwakilan dari negara-negara di kawasan Indo-Pasifik – yaitu pemimpin pemerintahan, menteri, serta tokoh-tokoh penting (*prominent figure*) – dimana BDF bersifat inklusif atau terbuka untuk semua negara di kawasan Indo-Pasifik, baik yang telah menganut demokrasi atau yang memiliki cita-cita untuk menjadi lebih demokratis.

Forum ini juga memiliki prinsip *homegrown democracy* yang berarti demokrasi didasarkan kepada praktik-praktik nyata dari nilai-nilai demokrasi oleh negara peserta dengan tidak berpretensi untuk menyalahkan atau membenarkan praktik nyata tersebut. Melalui penyelenggaraan BDF, Indonesia berkepentingan untuk mempromosikan citra bahwa nilai-nilai demokrasi merupakan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Indonesia memberikan wadah diskusi bagi negara-negara lain untuk saling belajar, sekaligus menunjukkan kepada negara lain bahwa Indonesia memiliki iklim demokrasi yang sangat baik. BDF juga mencitrakan bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia mampu menyelenggarakan *democracy forum* yang berarti Islam dan nilai-nilai demokrasi dapat berdampingan.⁴⁶

Upaya Indonesia untuk membangun citra Islam moderat pasca 9/11 ini juga mendapat dukungan dari dua organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Peristiwa dramatis terkait terorisme yang memperburuk citra Islam dan Indonesia menjadi konteks yang mendorong NU dan Muhammadiyah untuk ikut ambil bagian. Pertama, menanggapi peristiwa penting di dalam dan luar negeri terkait kasus terorisme, NU dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Musyawarah Besar (Mubes) NU tanggal 25-28 Juli 2002 mengeluarkan fatwa haram bagi bunuh diri yang dilakukan dalam aksi pengeboman dan teror. Penegasan yang sama dalam menolak terorisme juga dikeluarkan oleh Muhammadiyah dengan menyebut terorisme sebagai musuh agama dan kemanusiaan. Hal ini juga diperkuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga mengeluarkan Fatwa nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam Fatwa tentang Terorisme tersebut, MUI menegaskan bahwa segala tindakan teror yang menimbulkan ketakutan di masyarakat, maka hukumnya adalah haram. Berdasarkan Ijtima Ulama Komisi Fatwa di Indonesia pada tanggal 16 Desember 2003 juga telah ditetapkan fatwa tentang terorisme, dimana MUI menyatakan terorisme atau bom bunuh diri sebagai perbuatan terlarang.⁴⁷ Dalam memperkuat himbauan bahwa Islam harus membawa rahmat bagi seluruh jaringan, kerjasama sinergis juga dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah, dimana keduanya sama-sama mengedepankan platform yang ingin menampilkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

⁴⁵ Evan A. Laksmana, "Indonesia's Rising Regional and Global Profile: Does Size Really Matter?" dalam *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 33 No. 2, Agustus 2011, ISEAS-Yusof Ishak Institute, h. 158, diakses pada 10 Maret 2022 dari <https://www.jstor.org/stable/41288825>

⁴⁶ Wawancara dengan Alfian Amiruddin, Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

⁴⁷ Hasse Jubba, Jaffary Awang, dan Siti Aisyah Sungkilang, "The Challenges of Islamic Organisations in Promoting Moderation in Indonesia", dalam *Wawasan*, Vol. 6 No.1, 2021, h. 47, diakses pada 14 Juni 2022 dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw/article/view/12948/5883>

Di bawah pemerintahan SBY pula, beberapa pembuat kebijakan meyakini bahwa pengalaman Indonesia terkait pembangunan ekonomi, reformasi politik, dan terorisme Islam membuat Indonesia relevan untuk berbicara tentang tantangan yang dihadapi dunia Muslim. Dalam sebuah pidatonya di Arab Saudi, SBY mengulas banyak masalah yang dihadapi komunitas Muslim, termasuk islamofobia dan berpendapat bahwa umat Islam harus merespon dengan cara menguasai teknologi dan modernitas serta memiliki keunggulan budaya.⁴⁸ SBY menegaskan bahwa Islam bukan hanya agama perdamaian, tetapi juga salah satu bentuk kemajuan, yaitu dengan menyerukan kebangkitan Islam, mendesak Muslim untuk merangkul globalisasi, bekerjasama dengan non-Muslim dan bekerjasama melawan terorisme.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menggunakan referensi politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan menegaskan perlunya mendukung perjuangan rakyat Palestina, serta memposisikan Indonesia sebagai negara yang mempromosikan bentuk Islam “jalan tengah”, yaitu tidak liberal maupun radikal. Secara spesifik, dalam visi-misi yang disusun oleh pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dijelaskan bahwa Indonesia akan menguatkan kepemimpinan dalam forum negara-negara Muslim melalui tiga rencana aksi, yaitu penyebaran wacana Islam moderat (*Islam wasathiyah*), penguatan kerjasama dengan negara--negara Muslim (penguatan *ukhuwah Islamiyah*), dan penggalangan solidaritas untuk kemerdekaan Palestina.⁴⁹ Dinyatakan pula tentang pentingnya keberadaan dialog antar agama sebagai platform dalam mempromosikan *soft power* Indonesia, meskipun dalam faktanya hal ini belum menjadi instrumen utama dalam politik luar negeri Indonesia.

Pernyataan mengenai posisi Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam moderat juga senantiasa dipertegas oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pidato pembukaan *the High-level Consultation of Muslim Ulema and Scholars on Moderate Islam* yang dihadiri oleh sekitar 100 ulama dari Indonesia, Yaman, Mesir, Iran, Maroko, Italia, AS, dan berbagai negara lainnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia mendukung pembentukan poros Islam moderat global (*global moderate Islamic axis*). Dinyatakan pula bahwa posisi Indonesia sangat jelas, yaitu berkeinginan menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*.⁵⁰

Dalam perkembangannya, pernyataan, dukungan, dan kebijakan tentang Islam *rahmatan lil alamin* ini terus bermunculan dan digaungkan di berbagai kesempatan hingga saat ini. Pada tahun 2006 Menlu Hassan Wirajuda misalnya menyebut Islam moderat ini sebagai aset hubungan luar negeri Indonesia, sekaligus bagian dari *soft power* yang perlu dipertahankan. Kemlu RI di bawah kepemimpinan Menlu Marty Natalegawa juga mendukung upaya ormas Islam yang mengkampanyekan Islam moderat dan toleran ke dunia internasional. Di era Menlu Retno P. Marsudi hal yang sama juga disampaikan, yaitu dengan menggarisbawahi peran Indonesia sebagai pemberi solusi untuk masalah-masalah yang terjadi di negara-negara Muslim sebagai refleksi dari Islam moderat. Masalah-masalah yang dianggap sebagai masalah penting untuk diselesaikan oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah konflik yang terjadi di Palestina, Afghanistan dan Rohingya.⁵¹ Dinyatakan pula bahwa

⁴⁸ Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Islamic University of Iman Muhammad Bin Sa'ud, Riyadh, Saudia Arabia, 26 April 2006, diakses pada 21 Agustus 2021 dari <https://ex.kemlu.go.id/en/pidato/presiden/Pages/Remarks-By-H.E.-Dr.-H.-Susilo-Bambang-Yudhoyono-President-of-the-Republic-of-Indonesia-at-Islamic-Un.aspx>

⁴⁹ Evan A. Laksamana, “Will Religious Sectarianism Influence Indonesian Foreign Policy?”, dalam *The Strategist*, (APSI, 2018), diakses pada 21 Agustus 2021 dari <https://www.aspistrategist.org.au/will-religious-sectarianism-change-indonesian-foreign-policy/>

⁵⁰ Indonesia Supports Establishment of Moderate Islamic Axis, dalam *Republika*, 1 Mei 2018, diakses pada 19 Mei 2022 dari <https://www.republika.co.id/berita/p81p8k414/indonesia-supports-establishment-of-moderate-islamic-axis>

⁵¹ Hadza Min Fadhlil Robby, Promosi Islam Wasathiyah Indonesia ke Luar Negeri, h. 1, diakses pada 14 Juni 2022

pemerintah tidak bisa sendirian dalam menyebarkan pesan Islam *rahmatan lil alamin* tanpa bermitra dengan Muhammadiyah dan juga NU. Pernyataan ini sejalan dengan upaya penguatan antara relasi organisasi Islam dengan pemerintah dalam menciptakan sinergi antara diplomasi formal dan diplomasi non-formal atau disebut juga dengan *multi-track diplomacy*.

Konsistensi dan Signifikansi Penyelenggaraan Dialog Antar Agama dan Dialog Antar Peradaban dalam Upaya Indonesia Membangun Citra Islam Moderat Pasca 9/11

Indonesia memang serius dalam upaya memasukkan Islam moderat sebagai identitas barunya dalam politik global. Dua hal yang juga sering disebut adalah upaya Indonesia menjadi jembatan Islam-Barat serta jembatan antar dunia Islam. Kata moderat sendiri diambil sebagai identitas yang merujuk pada Islam yang toleran, damai, seimbang dan mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah. Dalam konteks ini, pemahaman secara umum tidak terlepas dari tiga faktor yang mengawali terbentuknya Islam moderat, yaitu pluralisme, modernisasi dan demokrasi. Lambat laun, istilah Islam moderat mulai diperkenalkan dalam politik luar negeri Indonesia yang menekankan kewajiban Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia untuk dapat menampilkan wajah Islam yang sebenarnya, yaitu Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.⁵²

Meskipun demikian, upaya Indonesia untuk membangun citra Islam moderat pasca 9/11 membutuhkan kesinambungan yang tercermin dalam bentuk kebijakan dari pemerintah yang tengah berkuasa. Sebagai contoh, prakarsa penyelenggaraan BDF oleh pemerintah Indonesia di era pemerintahan SBY sebetulnya merupakan salah satu upaya untuk melakukan pemulihan dari catatan buruk citra Indonesia di masa Orde Baru, sekaligus membuat Indonesia dapat menawarkan serta menarik simpati dari negara-negara industri modern seperti AS dan Uni Eropa, termasuk juga simpati negara-negara dunia ketiga yang diwujudkan dengan pernyataan netralitas dengan menempatkan kemanusiaan sebagai isu yang utama. BDF kemudian dipandang telah berhasil meningkatkan iklim reformasi investasi Indonesia, kemitraan strategis, sekaligus mengubah pandangan negara-negara industri modern terhadap Indonesia yang mulai mendapatkan respon positif dari dunia internasional karena dinilai dapat mempengaruhi pembangunan dan ketahanan nasional serta stabilitas domestik di masa mendatang.

Presiden Joko Widodo memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan SBY terkait BDF, dimana pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih bersifat *inward looking* dan *low profile* serta lebih mementingkan kerjasama yang dapat menghasilkan manfaat nyata dibandingkan hanya menghasilkan citra. Perbedaan pandangan tentang tingkat kepentingan BDF oleh kedua pemimpin Indonesia tersebut menggambarkan bahwa Indonesia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda terhadap *output* diplomasinya. Pemerintahan Presiden SBY mengutamakan *output* diplomasi Indonesia sebagai kekuatan untuk membangun kekuatan politik dan citra baik di kancah internasional, sedangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih memilih *output* diplomasi Indonesia sebagai sesuatu yang konkrit dan dapat diwujudkan serta ditampilkan lebih dari sekedar kekuatan politik dan citra baik bangsa.⁵³

Demikian pula halnya dalam menyikapi berbagai permasalahan dunia Islam internasional, peran dan komitmen Indonesia dalam menampilkan citra Islam moderat beberapa kali menghadapi tantangan yang signifikan. Terkait konflik Palestina-Israel di era pemerintahan Joko Widodo misalnya, desakan publik Indonesia bagi solusi dua negara, menguat. Indonesia sendiri dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah pendukung

https://www.researchgate.net/publication/338193776_Promosi_Islam_Wasathiyah_dalam_Politik_Luar_Negeri_Indonesia

⁵² Jeremy Menchik, "Moderate Muslims and...", h. 416.

⁵³ Mohamad Rosyidin, "Promoting A Home-Grown Democracy: Indonesia's Approach of Democracy Promotion in the Bali Democracy Forum (BDF)", dalam *Asian Journal of Political Science*, Vol. 28 Issue 3, 2020, h. 314, diakses pada 10 Maret 2022 dari <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02185377.2020.1814361>

kuat bagi perjuangan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Indonesia tidak pernah mengakui Israel. Indonesia bahkan telah berkali-kali menawarkan jasa-baiknya untuk membantu menengahi perpecahan antara Organisasi Pembebasan Palestina (*Palestine Liberation Organization/PLO*) dan *Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah* (Hamas). Hal ini didasarkan pada pengalaman dan perjuangan kemerdekaan Indonesia sendiri, dimana persatuan bangsa adalah prasyarat bagi tercapainya kemerdekaan. Sayangnya, keberadaan Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan mempunyai peran strategis serta modalitas dalam diplomasi penyelesaian konflik Israel-Palestina, ternyata menunjukkan bahwa upaya-upaya diplomasi Indonesia pada berbagai forum internasional dinilai kurang efektif. Ketidak-efektifan upaya diplomasi yang ditempuh Indonesia ini akan berimplikasi negatif pada komitmen Indonesia sebagai wujud konsistensi pemerintah Indonesia yang mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaannya.⁵⁴

Dalam menghadapi permasalahan etnis Muslim Rohingya di Myanmar, Indonesia bukan hanya berupaya menunjukkan citra Islam moderat, tetapi juga identitasnya sebagai *leading actor* di ASEAN, dimana hal ini tentu terkait dengan kepentingan Indonesia untuk tetap menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Ini kemudian menghasilkan sikap Indonesia yang lebih aktif dalam penyelesaian konflik dan penanganan permasalahan etnis Rohingya di Myanmar. Sebagai contoh, Indonesia membawa permasalahan ini ke tingkat regional, Indonesia juga menyepakati akan mengakomodasi sebanyak 7.000 pengungsi Rohingya dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini ditujukan untuk memberikan waktu kepada *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam melakukan pengumpulan data dan menunggu UNHCR menemukan negara ketiga sebagai tujuan dari para pengungsi atau kembali ke Myanmar.

Berbeda dengan sikap Indonesia yang ditunjukkan dalam merespon permasalahan etnis Rohingya, sikap Indonesia terhadap permasalahan Uighur di China tidak seaktif ketika mengatasi permasalahan etnis Rohingya. Hal ini memang disebabkan karena adanya konstruksi identitas Indonesia terhadap China berbeda dengan konstruksi identitas terhadap Myanmar. Ketika Indonesia menghadapi Myanmar, maka konstruksi identitas yang melekat adalah negara anggota ASEAN, sedangkan China bukan sebagai negara anggota ASEAN, sehingga identitas tetap berlaku tetapi tidak bersifat dominan. Indonesia juga melihat permasalahan etnis Uighur di China sebagai permasalahan separatistis di dalam negeri China. Di samping itu, kepentingan Indonesia lebih condong terhadap hubungan ekonomi dan perdagangan dengan China, terutama dalam menjaga arus investasi dari China untuk tetap masuk ke Indonesia. Maka tidak mengherankan bila kebijakan Indonesia ini, salah satunya terlihat dengan abstainnya Indonesia dalam bersikap terhadap permasalahan etnis Uighur di tingkat internasional.

Dalam forum PBB, peran dan komitmen Indonesia dalam menampilkan citra Islam moderat juga dipandang perlu dilakukan berbagai penguatan. Sebagai contoh dalam kasus proliferasi nuklir Iran, Indonesia yang memiliki kebijakan mendukung non-proliferasi nuklir dihadapkan pada masalah nyata ketika harus mengambil keputusan apakah mendukung tekanan Barat kepada Iran untuk menghentikan program nuklirnya atau mengambil kebijakan lain. Sebelumnya pada tahun 2007, Indonesia mendukung sanksi tambahan melalui Resolusi 1747 di Dewan Keamanan (DK) PBB, yaitu ketika Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengikuti langkah 14 anggota DK PBB lainnya yaitu AS, Inggris, Perancis, Rusia, China, Belgia, Kongo, Ghana, Italia, Panama, Peru, Qatar, Afrika Selatan dan Slovakia untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran karena pengembangan nuklirnya. Namun, di tahun 2008 ketika Indonesia masih duduk sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia merubah posisinya menjadi abstain terkait dijatuhkannya sanksi baru terhadap

⁵⁴ Masyrofah, Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia (Studi Diplomasi Pemerintahan Era Reformasi 1998-2018 dalam Upaya Penyelesaian Konflik Israel-Palestina), Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, h. 9.

Iran melalui Resolusi 1803. Perubahan posisi Indonesia ini menunjukkan bahwa Islam merupakan faktor penting yang mempengaruhi pergeseran keputusan pemerintah Indonesia terkait program nuklir Iran, dimana dalam hal ini berbagai kelompok Muslim (termasuk NU dan Muhammadiyah), tokoh masyarakat, dan anggota parlemen memandang bahwa Iran mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Banyaknya aksi protes membuat pemerintah memperhatikan aspirasi publik yang menuntut agar dukungan terhadap sanksi Iran dicabut. Pemerintah Indonesia yang sebelumnya mendukung argumentasi Barat bahwa Iran bersikap tidak transparan terkait pengembangan program nuklirnya, kemudian memandang tidak perlu lagi diberlakukan sanksi baru karena Iran sudah mulai menunjukkan sikap transparan.⁵⁵

Tantangan berikutnya adalah fakta bahwa sebagai akibat relatif diabaikannya dunia Islam di masa lalu, menyebabkan posisi Indonesia di Organisasi Kerjasama Islam (*Organisation of Islamic Cooperation/OIC*) menjadi cukup termarginalkan. Terdapat pula fakta bahwa banyak negara Arab yang cenderung memandang rendah kredibilitas Islam Indonesia, meskipun dalam isu-isu tertentu terbuka kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan hubungannya dengan negara-negara Islam di Timur Tengah. Dalam konteks ini, kepentingan yang lebih besar dalam meningkatkan hubungan dengan negara-negara Islam dipandang lebih berkaitan dengan keuntungan ekonomi yang diharapkan, ketimbang terkait dengan masalah Islam sebagai kepercayaan dan masalah yang dihadapi bersama di dunia global saat ini.⁵⁶

Tantangan terkait konsistensi dan signifikansi penggunaan agama sebagai *soft power* kontra-terorisme Indonesia dalam upaya membangun citra Islam moderat pasca 9/11, juga muncul dari dalam negeri Indonesia sendiri. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa berbeda dengan penerapan demokrasi sebagai nilai dalam kebijakan luar negeri, yang menghasilkan sedikit perselisihan domestik, penggunaan Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia sebetulnya dipandang lebih kontroversial. Kebangkitan Islam politik adalah ciri khas era reformasi Indonesia. Sama seperti pembuat kebijakan yang percaya bahwa mempromosikan demokrasi akan memperkuat reformasi politik di dalam negeri, beberapa pembuat kebijakan percaya bahwa memproyeksikan citra Islam moderat di luar negeri akan memicu “umpan balik” domestik dan membantu memperkuat tradisi moderat Indonesia. Tetapi setelah peristiwa Bom Bali I tahun 2002 yang menegaskan adanya ancaman teroris yang tumbuh di dalam negeri, beberapa pemimpin Indonesia – baik sekuler maupun Islam – percaya bahwa menggunakan agama dalam kebijakan luar negeri justru akan memberdayakan kaum radikal dan bukan kaum moderat, yaitu dengan memberi alat lain dengan mengatas-namakan Islam yang digunakan untuk melawan pemerintah. Azyumardi Azra menggambarkan bahwa peran Islam dalam kebijakan luar negeri sebagai “kebijakan ambiguitas”. Ambiguitas mengacu pada fakta bahwa di satu sisi, pemerintah Indonesia memperhatikan isu-isu yang terkoneksi kuat dengan Islam, tetapi di sisi lain mengecilkan faktor Islam yang menghubungkannya dengan masalah tersebut. Komunitas Muslim di Indonesia tidak monolitik, sehingga pemerintah Indonesia harus berhati-hati agar tidak mengambil sikap yang menimbulkan oposisi di dalam negeri.⁵⁷

Dalam faktanya pula, di Indonesia memang tidak mengemuka konflik sektarian antara Islam Sunni dan Syiah. Dalam perjuangan melawan ekstremisme Islam, Indonesia bahkan dipandang cukup beruntung dengan adanya keberadaan ormas seperti NU dan Muhammadiyah yang secara konsisten ikut menjadi simbol Islam moderat Indonesia. Meskipun demikian, terdapat kekhawatiran bahwa kinerja NU dan Muhammadiyah juga mengalami tantangan misalnya dengan keberadaan kelompok Islam sayap kanan, seperti

⁵⁵ Mohamad Zakaria Al-Anshori, *The Role of Islam...*, h. 94.

⁵⁶ Dewi Fortuna Anwar, “Foreign Policy: Democracy and Islam”, dalam *Postscript: Monthly Political and Economic Analysis*, Vol. III No. 5, (The Habibie Center, 2006), h. 8.

⁵⁷ Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam and Democracy*, (Jakarta: Equinox Publishing, 2006), h. 97.

Front Pembela Islam (FPI) yang mengklaim memiliki sekitar 200.000 anggota.⁵⁸ Dalam konteks ini, berbagai tindakan yang diusung FPI dipandang dapat menjadikan jurang yang semakin lebar terkait konsep nasional Indonesia tentang tradisi toleran dan pluralistik.

Berlandaskan pada pemaparan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia bukanlah pada penggunaan Islam secara instrumental dalam kebijakan politik luar negerinya. Tantangan sebenarnya adalah dalam memperkuat klaim bahwa, di Indonesia – demokrasi, Islam dan modernitas – benar-benar dapat berjalan beriringan. Hal ini penting sebagai titik tolak untuk membangun kebijakan luar negeri yang efektif yang pada akhirnya akan dapat mempengaruhi wacana global antara Islam dengan Barat, dan di dalam dunia Islam itu sendiri, sekaligus memantapkan klaim Indonesia sebagai bentuk alternatif masyarakat Islam. Dalam upaya mencapai tujuan ini, Indonesia harus mampu menunjukkan catatan keberhasilan dalam mentransformasi masyarakatnya menjadi masyarakat yang menjunjung nilai-nilai dan praktik-praktik Islam, sekaligus juga mampu berkontribusi pada konsolidasi demokrasi dan pelestarian pluralisme toleran yang terbuka bagi dunia luar, serta mampu merangkul modernitas. Hanya dengan begitu, Indonesia dapat memposisikan dirinya sebagai jembatan antara dunia Islam dengan Barat, sekaligus menjadi titik referensi yang memungkinkan bagi negara-negara Muslim lainnya yang berkeinginan belajar dari pengalaman Indonesia.

Relevansi Konsep *Fiqh Siyasah Dauliyah* dengan Dialog Antar Agama dan Dialog Antar Peradaban

Bila mencermati capaian berbagai dialog antar agama dan dialog antar peradaban yang diselenggarakan oleh Indonesia, maka dapat pula dinyatakan bahwa hal ini salah satunya diperuntukkan sebagai upaya menjelaskan kepada publik terkait keberadaan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*. Dalam konteks ini, selain mengandung unsur diplomasi publik berbasis dialog (*dialogue-based public diplomacy*), agama kemudian menjadi salah satu bentuk *soft power* yang digunakan sebagai bagian dari instrumen diplomasi publik Indonesia.

Dikaitkan dengan perspektif ajaran agama Islam, berbagai dialog antar agama dan dialog antar peradaban yang diselenggarakan oleh Indonesia ini relevan dengan ajaran agar umat Islam melakukan kerjasama dengan berbagai bangsa, golongan, dan masyarakat internasional. Urgensi membangun dialog antar agama dan antar peradaban juga memiliki landasan yang kokoh dalam Islam. Dialog tersebut dilandasi oleh universalisme Islam itu sendiri sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta yang juga menjadi misi utama Islam sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, dimana umat Islam tidak boleh mengambil peran pasif dalam dialog dan kemitraan dengan kelompok lain yang ditujukan untuk memberikan solusi bagi dunia. Misi ini tidak akan berhasil jika umat Islam menutup diri dan tidak mau berdialog dengan pemeluk agama lain.

Berbagai dialog antar agama dan dialog antar peradaban yang diselenggarakan oleh Indonesia ini juga merupakan kondisi yang diperlukan untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, kerukunan, dan koeksistensi agama di dunia saat ini. Dalam konteks ini, keragaman dalam Islam dinyatakan sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk kemaslahatan umat manusia. Banyak ayat Al-Qur'an yang menekankan keadilan (القسط) dan kebaikan (البر) dalam berhubungan dengan pemeluk agama lain, termasuk pernyataan pentingnya untuk bekerja sama dan menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama tanpa memandang agama, budaya dan ideologi. Dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan Al-Hujurat ayat 13, ayat-ayat ini mengungkapkan konsep kesatuan yang komprehensif dan unik dengan menekankan asal-usul umat manusia yang sama. Asal-usul tunggal umat manusia ini merupakan dasar dari kesetaraan sesama manusia. Dari sini, dapat dimaknai bahwa ajaran

⁵⁸ Krithika Varagur, "Indonesia's Moderate Islam is Slowly Crumbling", dalam *Foreign Policy*, diakses pada 18 Juni 2022 dari <https://foreignpolicy.com/2017/02/14/indonesias-moderate-islam-is-slowly-crumbling/>

Al-Quran untuk mengenal satu sama lain adalah sebuah petunjuk urgensi dilakukannya dialog antar peradaban dan antar agama.

Dikaitkan dengan sudut pandang Islam pula, secara spesifik konsep dialog antar peradaban dan antar agama didasarkan pada kajian analisis tekstual dan interpretasi historis terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini, Al-Quran menunjukkan berbagai contoh dialog yang salah satunya termaktub dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang meminta umat Islam untuk menunjukkan sopan santun dan kebijaksanaan terbaik ketika berdebat dengan orang-orang dari agama lain. Kebijaksanaan, percakapan penuh hormat, dan perilaku ramah adalah penting untuk memperkuat hubungan timbal balik. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh nyata dalam melibatkan dan memelihara dialog dan kerukunan dengan orang-orang yang berbeda agama, dimana Nabi Muhammad SAW menggunakan metode diplomasi dan negosiasi, baik secara pribadi maupun sebagai jalan dakwah dalam mengajak banyak orang untuk memeluk Islam.⁵⁹ Cara yang ditempuh Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan perlakuan yang sama terhadap Muslim dan non-Muslim. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ajaran Al-Quran dan Sunnah merupakan model untuk mempromosikan dialog dan kerukunan antar agama.

Kesimpulan

Terdapat kesadaran yang berkembang di antara para ahli dan praktisi kajian Hubungan Internasional bahwa agama merupakan faktor penting dalam politik global. Peristiwa 9/11 yang diikuti dengan pernyataan Presiden AS George W. Bush terkait *global war on terror* merupakan salah satu alasan terjadinya peningkatan fokus pada agama dalam isu-isu internasional. Agama sendiri dipandang memiliki fungsi penting dalam melahirkan dan mempengaruhi nilai-nilai, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi dasar pertimbangan proses perumusan politik luar negeri dan kebijakan negara. Di samping itu, untuk dapat memahami peran agama kontemporer dalam hubungan internasional, maka diperlukan upaya untuk mengkaji berbagai macam interaksi yang terjadi di ranah internasional dan domestik (intermestik). Saat ini, keberadaan agama bahkan diproyeksikan sebagai sebuah *soft power* yang menjadi bagian dari politik luar negeri banyak negara, dimana didalamnya melibatkan peran dan aktivitas banyak aktor non-negara melalui diplomasi multi-jalur (*multi-track diplomacy*).

Hal ini pulalah yang mendasari Indonesia yang di tahun 2004 baru saja memasuki era demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden SBY melakukan perubahan dalam politik luar negerinya, yang ditandai dengan memberikan pengakuan terhadap aspirasi baru umat Islam, yaitu dengan menegaskan bahwa identitas internasional negara Indonesia akan mencerminkan posisinya sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan sekaligus mewakili suara Islam moderat. Terkait upaya untuk memproyeksikan wajah Islam yang *rahmatan lil alamin*, sekaligus membangun citra Islam moderat ini, maka dilakukan berbagai upaya penguatan kemoderatan sebagai tema besar politik luar negeri Indonesia. Hal ini ditempuh dengan pemberdayaan kelompok moderat di dalam negeri sebagai langkah awal, dimana dinyatakan bahwa keberhasilan memerangi terorisme juga akan ditentukan oleh pemberdayaan kaum moderat (*empowering moderates*).

Dalam konteks ini, berbagai program diplomatik yang berfokus pada Islam moderat sebagai citra Islam Indonesia dalam politik global kemudian diselenggarakan, diantaranya adalah dialog antar-agama (*interfaith dialogues*), dialog antar-peradaban (*inter-civilization dialogues*), *Bali Democracy Forum (BDF)*, menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Cendekiawan Islam (*the International Conference of Islamic Scholars/ICIS*), serta *the High-level Consultation of Muslim Ulema and Scholars on Moderate Islam*. Seiring perjalanannya,

⁵⁹ Arshid Iqbal Dar dan Jamsheed Ahmed Sayed, "Diplomacy in Islam", dalam *Asian Journal of Science and Technology*..., h. 517.

berbagai upaya dan program diplomatik yang ditempuh pemerintah Indonesia ini dihadapkan pada tantangan terbesar, yaitu terkait pertanyaan yang mengemuka apakah Indonesia akan mampu menghadapi tantangan aspirasi nasional dan harapan internasionalnya sendiri, sehingga statusnya sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dan negara Muslim terbesar di dunia dapat digunakan sebagai pengungkit dalam politik luar negerinya. Hal ini akan berkontribusi pada kemampuan Indonesia dalam mempromosikan kepentingan nasionalnya, dalam menengahi konflik internasional yang melibatkan kepentingan Muslim, sekaligus dalam memberikan model alternatif masyarakat Islam modern yang moderat.

Dikaitkan dengan perspektif ajaran agama Islam, berbagai dialog antar agama dan dialog antar peradaban yang diselenggarakan oleh Indonesia ini relevan dengan ajaran agar umat Islam melakukan kerjasama dengan berbagai bangsa, golongan, dan masyarakat internasional (*fiqh siyasah dauliyah*) yang ditujukan untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, kerukunan, dan koeksistensi agama di dunia saat ini. Meskipun demikian, tulisan ini belum membahas lebih lanjut seberapa efektif penggunaan instrumen dialog antar agama dan dialog antar peradaban tersebut mencapai keberhasilan dalam upaya menjelaskan kepada publik terkait keberadaan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*.

Daftar Pustaka

- Abdelkader, Deina, *Islam in International Relations: Politics and Paradigms*, (London & New York: Routledge, 2019).
- Al-Anshori, Mohamad Zakaria, *The Role of Islam in Indonesia's Contemporary Foreign Policy*, (Disertasi, Victoria University of Wellington, 2016).
- Anwar, Dewi Fortuna, "Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia", dalam *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Vol. 3, The Indonesian Institute of Sciences, 2010, diakses pada 16 Januari 2022 dari <http://jissh.journal.lipi.go.id/index.php/jissh/article/view/45/102>
- Anwar, Dewi Fortuna, "The Impact of Domestic and Asian Regional Changes on Indonesian Foreign Policy", dalam *Southeast Asian Affairs 2010*, ISEAS-Yusof Ishak Institute, diakses pada 30 Desember 2021 dari <https://www.jstor.org/stable/41418562>
- Azra, Azyumardi, "Many Asian Nations are Experiencing a Revival of Religion in Public and Political Life", dalam *Melbourne Asia Review*, diakses pada 8 Juni 2022 dari <https://melbourneasiareview.edu.au/many-asian-nations-are-experiencing-a-revival-of-religion-in-public-and-political-life/>
- Berger, Peter, *The Desecularization of the World: Resurgence Religion and World Politics*, (Washington DC: William B. Eerdmans/Ethics and Public Policy Center, 1999).
- Diamond, Louise, dan John Mc. Donald, *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*, (New York: Kumarian Press, 1996).
- Jubba, Hasse, "The Challenges of Islamic Organisations in Promoting Moderation in Indonesia", dalam *Wawasan*, Vol. 6 No.1, 2021, diakses pada 14 Juni 2022 dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw/article/view/12948/5883>
- Kegley Jr., Charles W dan Eugene Wittkopf, *World Politics: Trends and Transformation*, 8th ed., (Boston: Bedford/St. Martins, 2001).
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Laporan Kinerja 2020 Direktorat Diplomasi Publik, Januari 2021.
- Laksamana, Evan A., "Will Religious Sectarianism Influence Indonesian Foreign Policy?", dalam *The Strategist*, (APSI, 2018), diakses pada 21 Agustus 2021 dari <https://www.aspistrategist.org.au/will-religious-sectarianism-change-indonesian-foreign-policy/>
- Mandaville, Peter, dan Shadi Hamid, "Islam as Statecraft: How Governments Use Religion in Foreign Policy", (Washington D.C: Georgetown University's Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs, 2018).
- Marcelo, Ray, Australia Welcomes Interfaith Dialogue Action Plan, diakses pada 11 Maret 2022 dari https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/mr12_011.html
- Menchik, Jeremy, "Moderate Muslims and Democratic Breakdown in Indonesia", dalam *Asian Studies Review*, Vol. 43 Issue 3, 2019, diakses pada 11 Maret 2022, dari <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10357823.2019.1627286>
- Nye, Joseph S., *The Future of Power*, (New York: Public Affairs, 2011).
- Nye, Malory, *Religion: The Basics*, 2nd ed., (London: Routledge, 2003).
- Perwita, Anak Agung Banyu, Islam "Symbolic Politics", Democratisation and Indonesian Foreign Policy, 1999, Buenos Aires: Centro Argentino de Estudios Internacionales, diakses pada 16 Januari 2022 dari https://www.files.ethz.ch/isn/125059/AP_04.pdf.
- Robby, Hadza Min Fadhli, Promosi Islam Wasathiyyah Indonesia ke Luar Negeri, diakses pada 14 Juni 2022 dari https://www.researchgate.net/publication/338193776_Promosi_Islam_Wasathiyyah_dalam_Politik_Luar_Negeri_Indonesia
- Songbatumis, Aisyah Mumary, "The Role of Islam in Indonesian Foreign Policy: A Case of Susilo Bambang Yudhoyono", dalam *Polish Political Science Yearbook*, Vol. 50 (2),

- 2021, h. 89, diakses pada 6 Februari 2022 dari <https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppsy/50/ppsy202119.pdf>
- Sukma, Rizal, *Islam in Indonesian Foreign Policy*, (London: Routledge, 2004).
- Thomas, Scott M., *The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations: The Struggle for the Soul of the Twenty-First Century*, (New York: Palgrave Macmillan, 2005).
- Tibi, Bassam, *Islam in Global Politics: Conflict and Cross-Civilizational Bridging*, (New York: Routledge, 2012).
- Tibi, Bassam, *Islam Between Culture and Politics*, (New York: Palgrave, 2001).
- Wirajuda, Hassan N., “Refleksi 2004 dan Proyeksi 2005”, dalam *Himpunan Pidato/Sambutan Menteri Luar Negeri Tahun 2004*, (Jakarta: BPPK Kemenlu, 2005).
- Yudhoyono, Susilo Bambang, “Independent and Active Foreign Policy in the 21st Century”, dalam *Transforming Indonesia: Selected International Speeches*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2005).



CERTIFICATE OF APPRECIATION

This is to certify that

Rizki Damayanti

has actively participated as SPEAKER

in the 22nd Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)

RECONTEXTUALIZING FIQH FOR EQUAL HUMANITY AND SUSTAINABLE PEACE

held on May 2-5, 2023 in UIN Sunan Ampel Surabaya, East Java

Surabaya, May 5, 2023

Director General of Islamic Education
Ministry of Religious Affairs of Republic of Indonesia



Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, M.T.



**ANNUAL INTERNATIONAL
CONFERENCE
ON ISLAMIC STUDIES**

**المؤتمر السنوي الدولي
للدراستات الاسلامية**

